

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai tugas untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penetapan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan keberadaan desa sebagai topik dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan tugas kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta membentuk upaya kemandirian dengan kemampuan yang dimilikinya. Undang-undang tersebut memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa sendiri. Untuk itu, setiap desa akan diberi dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat relevan.

Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia memicu kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka diupayakan adanya transparansi,

akuntabilitas, dan kerja sama baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (<http://www.bpkp.go.id>).

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan biaya yang layak. Dalam permendagri No. 13 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dijelaskan jika desa mempunyai beberapa sumber pendapatan desa yang terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Transfer
3. Pendapatan lain-lain

Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana desa yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi serta pengawasan dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (*principle*) atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015:9). Akuntabilitas publik adalah informan atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah sebuah pemaparan manajemen organisasi sektor publik mengenai aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan dengan sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015:18).

Proses perencanaan pembangunan desa perlu diimbangi oleh adanya beberapa hal seperti: kapasitas aparatur pemerintah, sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber dana. Bersamaan dengan hal ini, maka untuk mengukur tingkat pencapaian atas rencana yang ditetapkan dengan sasaran yang ingin dicapai perlu dilakukan evaluasi atas kinerja (Ramanadei, 2019).

Dalam *m.antarnews.com* Lembaga *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi melansir ada 53 perkara kasus penyalagunaan dana desa periode 2018-2019 yang tersebar di sejumlah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Dalam perkara tersebut melibatkan 52 orang terdakwa sebagai aktor korupsi dari aparat desa. Datanya, dari periode 2018-2019 jumlah kepala desa yang menjadi terdakwa korupsi dana desa sebanyak 37 orang, dan 15 orang perangkat daerah sebagai terdakwa penyalahgunaan ADD.

Dalam *Fajar.co.id*. Kepala bidang pemerintahan desa dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) Luwu Utara, Ikdhianhi, mengakui belum ada pencairan dana desa dan dana penghasilan tetap (siltap) kepala desa. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban ini seharusnya sudah masuk pada 31 desember lalu. Namun, para kepala desa molor memasukkan pertanggungjawaban. Makanya, dana desa tidak bias cair. Hanya sebagian yang sudah memasukkan.

Berdasarkan konten isu diatas terdapat beberapa faktor yang dapat berdampak terhadap kinerja pemerintah desa diantaranya yaitu transparansi dan pengawasan keuangan desa. Dalam penelitian ini berfokus pada variabel transparansi dan pengawasan keuangan desa. Penelitian tentang kinerja pemerintah desa telah banyak dilakukan di Indonesia. Hasil dari penelitian yang

dilakukan oleh Putri, M. Suharno, Widarno, B (2015), Gobel (2017) dan Nurahmi (2019) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nicolla (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi secara parsial tidak mempengaruhi kinerja pemerintah Desa

Penelitian yang dilakukan Oleh Putri, M. Suharno, Widarno, B (2015), Adha dan Ernawati (2016) yang meneliti tentang pengaruh pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa dengan hasil penelitian bahwa secara parsial pengawasan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Namun sebaliknya Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Transparansi dan Pengawasan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi pada Desa Pao Macang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
2. Apakah pengawasan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah desa, khususnya mengenai transparansi dan pengawasan keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi pemerintah kabupaten, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai kinerja pemerintah desa yang harus transparan di bawah pengawasan.
2. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya kerja sama masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah desa menuju desa yang baik.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pembahasan mengenai batasan masalah dalam penelitian ini ditujukan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian. Ruang lingkup mengharuskan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Batasan masalah dalam penelitian ini sangat penting dan menyandingkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah masalah pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stewardship

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. (Donaldson and Davis, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; David, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vagas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*.

Penggunaan teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menegaskan eksistensi pemerintah desa sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan bekerja sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa melakukan

tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan agar penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, apat dipahami dan dapat dibandingkan).

2.2 Teori kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang diraih oleh seseorang). Dalam kamus bahasa indonesia (2002:273), istilah kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dapat dicapai menurut E, Mulyasa (2003), kinerja adalah “segala upaya yang dilakukan dengan mencapai tujuan”.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Pasolong (2010:197), merumuskan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan Pasolong (2010), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Pendapat lain dikemukakan King Patricia (1993), yang mengemukakan pengertian kinerja adalah kegiatan seseorang dalam menjalankan tugas pokok yang dimandatkan kepadanya. Berbeda lagi pendapat Moeharino (2012) yang mengatakan bahwa kinerja adalah capaian yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan tugas tanggung jawab masing-masing agar mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

2.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Berikut beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja menurut Mangkunegara (2010):

a) Faktor kemampuan (*ability*)

Secara psikologi, kemampuan (*ability*) pegawai terdiri kemampuan prestasi (IQ) dan kemampuan (*reality knowledge + skill*). Artinya, pegawai yang mempunyai IQ di atas rata-rata IQ 110-120 dengan pendidikan yang cukup untuk jabatannya dan ahli dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diinginkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man in the right place, the right man on the right job*).

b) Faktor motivasi (*motivation*)

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan keadaan yang mendorong diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).

c) Faktor pengawasan

Pengawasan merupakan proses atau langkah pencegahan dari tindakan-tindakan penyimpangan fatal dan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan kecil yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan organisasi serta menjamin tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan sebelumnya. Faktor ini sangat erat kaitannya terhadap kinerja karena jika pengawasan tidak berkualitas maka kinerja pemerintah masih diragukan.

d) Faktor transparan

Pemerintah yang baik akan memperhatikan prinsip transparansi dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. komponen transparansi berhubungan dengan tuntutan bagi aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai sehingga terciptanya kinerja pemerintah yang baik.

2.2.2 Indikator kinerja

Menurut Agus Dharma (2003) dalam bukunya indikator yang digunakan untuk mengkaji kinerja sebagai berikut:

- a) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus dicapai. Pengukuran kuantitatif mengimplikasikan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkenaan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
- b) Kualitas, yaitu kadar yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kuantitatif keluaran menggambarkan pengukuran tingkat kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluarannya.
- c) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang ditetapkan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang mematok ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

2.3 Desa

2.3.1 Definisi Desa

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, yang dimaksud sebagai desa adalah *“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Kewenangan desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b) Kewenangan lokal berskala desa
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. selain itu desa juga berhak untuk menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, serta menetapkan sumber pendapatan. selain itu desa memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan masyarakat desa, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat,serta memberikan pelayanann kepada masyarakat desa.

2.3.2 Pemerintah Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a) Kepastian hukum
- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c) Tertib kepentingan umum
- d) Keterbukaan
- e) Proporsional
- f) Efektivitas efisiensi
- g) Kearifan lokal
- h) Keberagaman
- i) Partisipasi

Setiap desa memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa (yang mencakup kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1) Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan pengurusan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga bertugas menetapkan peraturan desa yang telah disetujui BPD. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 26, kepala desa wajib:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- d) Memberikan dana atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat akhir tahun anggaran.

2) Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa terdiri atas:

a) Sekretaris Desa

Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala urusan, kepala urusan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawab.

b) Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1)

2.4 Transparansi

2.4.1 Definisi Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi yang berkepentingan (Atmadja, 2013:19)

Sedangkan itu menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang diterima selaras dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa ukuran, yaitu *Invormativeness* (informatif) dan *Disclosure* (pengungkapan) Mardiasmo (2009:19).

Transparansi pengelolaan keuangan dana desa wajib dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa desa dapat memenuhi prinsip akuntabilitas Secara jelas. Informasi publik diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (PKI). Desa menjadi salah satu bagian dalam UU KIP tersebut. Namun, transparansi pengelolaan dana desa dianggap sebagai risiko bagi sebagian pejabat publik. Beberapa informasi mengenai kebijakan penggunaan dana desa

biasanya hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Tertutupnya informasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dinilai sensitif jika dihadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi. Sehubungan dengan kapasitas pengelolaan keuangan tersebut, ada dua aspek yang perlu dicermati, yaitu standar akuntansi keuangan dan pemanfaatan aplikasi keuangan desa.

2.4.2 Prinsip-prinsip Transparansi

Berikut beberapa prinsip dalam transparansi menurut Krina, Loina Lalolo (2003):

- a) Sikap terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapnya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, baik hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
- b) Menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.4.3 Indikator Transparansi

Menurut Kristianton (2006:73) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

- a) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c) Keterbukaan Proses

d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2.5 Pengawasan Keuangan Desa

2.5.1 Definisi pengawasan

Pengawasan adalah suatu cara melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sesuai dengan standar tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dibutuhkan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

2.5.2 Tujuan Pengawasan

Pontas (2004) mengemukakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan agar pemerintahan dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Governemt*). Selain itu pengawasan internal pemerintah diharapkan dapat memotivasi instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi, serta pembangunan nasional terlaksana sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan otonomi daerah, dan sumber dayanya demi memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

2.5.3 Fungsi Pengawasan

Fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan juga menyampaikan hasil surat/laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga, yang sudah diteliti.

Ernie (2005:12), fungsi dari pengawasan antara lain:

- a) Menilai keberhasilan dan pencapaian target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b) Mengambil langkah penjelasan dan koreksi terhadap kekeliruan yang bisa saja ditemukan.
- c) Menjalankan berbagai opsi solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan.

2.5.4 Indikator Pengawasan

Adapun indikator pengawasan menurut Jufrizen (2016):

- a) Menentukan ukuran pelaksanaan, artinya cara untuk mengukur pelaksanaan minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- b) Memberikan penilaian, artinya menilai setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaan baik atau tidak.
- c) Mengadakan korektif, tindakan ini dibuat untuk mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi.

2.5.5 Keuangan Desa dalam UU Desa

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang masih berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Arief Rahman (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa.	Variabel Terikat: Pengelolaan Dana Desa (Y) Variabel Bebas: Akuntabilitas (X1) Transparansi Pemerintah Desa (X2)	Hasil penelitiannya membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
2	Priyatun,I (2016)	Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Variabel Terikat: Pengelolaan Dana Desa (Y) Variabel Bebas: Pengawasan (X1)	Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengawasan tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana oleh inspektorat daerah kabupaten lampung selatan
3	Rulyanti, D (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Variabel Terikat: kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bondowoso Jawa Timur (Y) Variabel Bebas: komitmen organisasi(X1) dan sumber daya manusia (X2) Regulasi(X3) dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa, sedangkan regulasi dan komunikasi tidak

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			komunikasi (X4)	berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa.
4	Arifianti, H (2013)	Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)	Variabel Terikat: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Y) Variabel Bebas: Pemeriksaan (X1) dan Pengawasan (X2)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5	Sumarjo, H (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Terikat: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Variabel Bebas: Karakteristik Pemerintah Daerah (X1)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah
6	Aziz, A (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Terikat: Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Variabel Bebas: Karakteristik (X2), <i>(size)</i> Ukuran Pemda (X2), <i>Intergovernmental revenue (X3)</i> , Belanja Daerah (X4)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemda (<i>size</i>), <i>intergovernmental revenue</i> dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
7	Wiguna, M. B. S (2015)	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng	Variabel Terikat: Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Variabel Bebas: Pengawasan Keuangan Daerah (X1), Akuntabilitas (X2) dan Transparansi engelolaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi engelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten buleleng

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			Keuangan Daerah (X3)	
8	Putra, N (2016)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating pada Provinsi Sumatera Utara	Variabel Terikat: Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Variabel Bebas: Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Akuntabilitas (X2) dan Transparansi (X3)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara transparansi memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

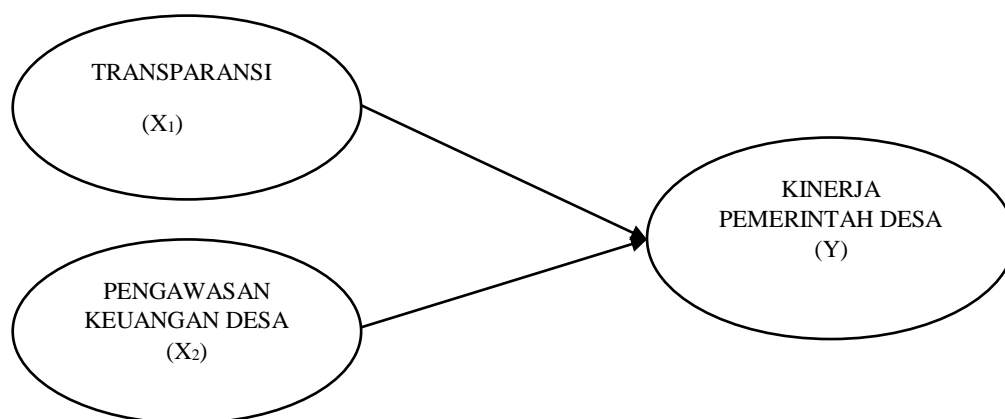
2.7 Kerangka Konseptual

Menurut Nawawi (1995:39) setiap penelitian harus memiliki tolak ukur dalam memecahkan masalahnya. Untuk itu, perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam mengelola keuangan, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Maka perlu kita ketahui apakah pemerintah sudah transparan sehingga merumuskan pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa.

Banyaknya kasus penyalahgunaan APBDES yang terjadi saat ini membuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi bagian terpenting. Dimana BPD berperan dalam pengawasan kinerja pemerintah demi menciptakan

pembangunan yang memajukan desa. Sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis dalam menciptakan *check and balances* penyelenggaraan pemerintah desa.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori (Sugiyono, 2009).

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa

H2: Pengawasan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Malhotra (2004), desain penelitian adalah kerangka kondisi suatu proyek riset, dimana didalamnya terdapat prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi dan memecahkan masalah-masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan-pendekatan Deduktif-Induktif.

Menurut Sugiyono (2010), Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih dan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain dan menurut Indriantoro, Nur Dan Bambang Supomo (2011:84), metode survey terdapat dua metode didalamnya yaitu kuesioner (pernyataan tertulis) wawancara (pertanyaan lisan). Kuesioner dapat langsung dikomunikasikan dan dikumpulkan. Wawancara dapat dilakukan dengan komunikasi tatap muka atau telepon. Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitin purposive sampling dan metode survei yaitu kuesioner.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dipilihnya Desa Paomacang sebagai tempat penelitian untuk mengetahui seperti apa kinerja pemerintah setempat dalam melaksanakan pemerintahannya, pembinaan masyarakat, pembangunan serta pemberdayaan masyarakatnya. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2-3 bulan.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah di teliti. Seperti menurut sugiyono (2011:800) populasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat ini merupakan acuan peneliti untuk menentukan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa paoamcang yang berjumlah 100 Orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Menurut sugiyono (2011:81) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, dalam pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportional area random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan kategori dalam penelitian yang

memiliki ciri-ciri populasi yang tiap dusun berbeda jumlah penduduknya. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dusun, Ketua RT/RW, BPD dan Toko Masyarakat.

Tabel 3.1
Sampel Penelitian

Dusun	Kepala Dusun	RT	RW	Tomas	BPD
Capna	1	1	1	20	6
Sappana	1	1	1	20	
Paomacang	1	1	1	20	
Jumlah Sampel	75				

Sumber: paomacang.luwuutarakab.go.id

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan data primer, yang diperoleh melalui alat pengumpul data berupa kuisioner yang diedarkan secara langsung sumbernya dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Kuesioner menggunakan skala likert lima poin yaitu: mulai dari sangat setuju (SS = 5); Setuju (S = 4); Netral (N = 3); tidak setuju (TS = 2) dan sangat tidak setuju (STS = 1).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Kuesioner/Angket

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner/angket. sugiyono (2013:137) berpendapat bahwa kuesioner/angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sebagai suatu alat pengumpul data dalam *assessment non test* berupa serangkaian yang diajukan kepada responden. Kuesioner ditujukan kepada stakeholder pemerintah desa. Bidang pernyataan yang di bagikan kepada responden berisi masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan indikator-indikator variabel pada kisi-kisi instrumen penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada stakeholder pemerintah desa. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator yang membentuknya. Variabel yang digunakan adalah Variabel Bebas (*Independent Variable*) dan Variabel Terikat (*Dependent Variable*).

Tabel 3.2
Definisi Operasioanal

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
Transparansi	Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen • Kejelasan dan kelengkapan informasi • Keterbukaan proses • Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 	Kristianton (2006:73) Mardiasmo (2009:19)
Pengawasan Keuangan	Pengawasan yaitu suatu cara untuk melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan ukuran pelaksanaan • Memberikan Penilaian • Mengadakan Korektif 	Jufrizen (2016)
Kinerja Pemerintah Desa	Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya yang diberikan kepadanya	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantitas • Kualitas • Ketepatan Waktu 	Dharma (2003:355)

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data untuk memecahkan suatu persoalan dan menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu handphone untuk dokumentasi dan alat lainnya seperti buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting.

3.8 Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 22 dengan menggunakan metode uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis, asumsi klasik. yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.8.1 Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya indikator kuesioner dari masing-masing variabel. Pengujian dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} . Nilai r_{hitung} merupakan hasil jawaban responden pada tiap pernyataan dengan total jawaban masing-masing variabel. Setiap item pernyataan disebut valid apabila r_{hitung} lebih besar dibandingkan r_{tabel} .

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah indikator atau kuesioner yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Reliabilitas suatu koesioner dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* , yaitu jika nilai *Cronbach's*

Alpha lebih besar ($>$) 0.60 maka kuesioner dikatakan reliabel, sedangkan jika nilai *Cronchach's Alpha* lebih kecil ($<$) 0,60 maka indikator tidak reliabel.

3.8.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Menurut Hasan Iqbal (2001) statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data agar mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal yang menjelaskan atau memberikan keterangan mengenai data atau keadaan.

Suryoatmono (2004) menyatakan bahwa statistika deskriptif menggunakan data suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Dan menurut Sugiyono (2004) analisis deskriptif digunakan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.8.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji adanya pengaruh transparansi(X_1), pengawasan keuangan desa(X_2) terhadap kinerja pemerintah desa(Y). Analisis ini digunakan peneliti dengan tujuan untuk menggambarkan seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi. Secara umum persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Pemerintah Desa

X₁ = Transparansi

X₂ = Pengawasan Keuangan Desa

e = Eror

3.8.3 Uji Hipotesis

Hipotesis adalah cabang Ilmu Statistika Inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut.

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun kriteri penolakan atau penerimaan uji F adalah:

H₁ diterima jika:

- 1) $F_{hitung} \leq F_{table}$ maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 diterima dan Hipotesis 2 ditolak ini berarti tidak terdapat pengaruh simultan oleh variabel X dan Y
- 2) $F_{hitung} \geq F_{table}$ maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 ditolak dan Hipotesis 2 diterima hal ini berarti terdapat pengaruh yang simultan terhadap variabel X dan Y

b. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Menurut suharyadi dan purwanto(2011) uji signifikansi parsial (uji t) atau individu digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan t tabel.

c. Uji Koefisien Determinasi (R square)

Koefisien determinasi (R square) atau disimpulkan dengan R^2 yang bermakna sebagai pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat (Y), atau dengan kata lain koefisien determinasi (R square) ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Paomacang

Penelitian ini dilakukan untuk menguji transparansi dan pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di desa paomacang, berikut gambaran desa paomacang yang menjadi objek dalam penelitian ini:

4.1.1 Gambaran Umum Geografis

a) Luas Desa Paomacang 744 Km² Ha. Terdiri dari 3 dusun:

1. Dusun Capna
2. Dusun Sappana
3. Dusun Paomacang

b) Batas Wilayah :

1. Utara : Desa Rawamangun
2. Timur : Sungai Kanjiro
3. Selatan: Desa Lino
4. Barat : Desa Lino dan Wonokerto

c) Kondisi Geografis :

1. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 200 m
2. Banyaknya curah hujan : 1,928 mm/tahun

d) Orbitasi / Jarak dari Pemerintahan Desa

1. Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 4 Km
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 24 km

4.1.2 Gambaran Umum Demografis

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Jenis Kelamin

No	Dusun	Jumlah (KK)	Jumlah Jiwa		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Capna	114	371	351	722
2	sappana	102	234	245	479
3	Paomacang	63	220	242	462
Jumlah		279	825	838	1.663

Sumber: Data LKPJ Akhir jabatan, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 1.663 jiwa pada 279 KK.

Tabel 4.2
Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Paomacan

Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan	Pendidikan
Jusman D. S.An	GK, 13-04-1975	Kepala Desa	S1
Nurdin Siasa	GK, 01-01-1987	Sekretaris Desa	S1
Nurlia S.E	GK, 14-03-1996	Kasi Pemerintahab	S1
Lukman	GK, 21-07-1991	Kasi Kesejahteraan	SLTA
Irwansyah	GK, 23-03-1968	Kasi Perencanaan	SLTA
Made Ranto S.Pd	GK, 16-05-1981	Kaur Keuangan	S1
Tajuddin	GK, 08-06-1970	Dusun Capna	SLTA
Sufriadi	GK, 14-08-1976	Dusn Sappana	SLTA
Muhajir	GK, 17-08-1978	Dusun Paomacang	SLTP

Sumber: Data LKPJ Akhir jabatan, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat data dari perangkat desa pada akhir jabatan 2019.

Tabel 4.3
Data Badan Permusyawaratan Desa

Nama	Jabatan	Pendidikan
Bahri	Ketua	SLTA
Miksan	Wakil Ketua	SLTP
Ahlis Nurholis	Sekretaris	S1
Nengah Ginastro	Anggota	SLTP
Nurding	Anggota	SLTP
Ishak	Anggota	SLTP
Marfianti	Anggota	S1

Sumber: Data LKPJ Akhir jabatan, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa data tersebut merupakan data dari BPD desa paomacang akhir jabatan 2019.

4.1.3 Visi Misi Desa Paomacang

a) Visi Pembangunan Desa

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, makmur, bahagia, sejahtera lahir batin menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

b) Misi Pembangunan Desa

1. Meningkatkan kapasitas desa dalam melaksanakan otonomi desa
2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan keterbukaan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia
3. Mewujudkan pengembangan SDM masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat

4.2 Deskripsi Data Penelitian

1. Responden Penelitian

Tabel 4.4

Responden Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Kuesioner yang disebar	75
2	Kuesioner yang kembali	75
3	Kuesioner yang tidak kembali	-
4	Kuesioner yang dapat diolah	75

Sumber : data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat jumlah responden penelitian sebanyak 75 dan tidak ada kendala dalam penyebaran kuesioner.

2. Jenis kelamin responden

Adapun data mengenai jenis kelamin responden di desa paomacang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jenis Kelamin	Jumlah
A	LAKI-LAKI	40
B	PEREMPUAN	35
Jumlah		75

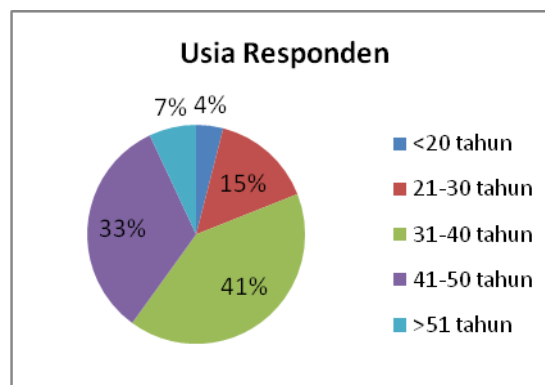
Sumber: data primer diolah, 2020

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa terdapat 75 responden dalam penelitian ini, 40 laki-laki dan 35 perempuan.

3. Usia Responden

Adapun data mengenai usia responden di desa paomacang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Usia Responden



Sumber: data primer diolah, 2020

Berdasarkan keterangan gambar 4.1 diketahui bahwa masyarakat di desa paomacang sebagai responden sebagian besar berusia 21-50 tahun. pada gambar tersebut, memberikan informasi bahwa mayoritas responden berusia 31-40 tahun

sebanyak 31 orang, sedangkan yang berusia 41-50 tahun sebanyak 26 orang dan yang berusia 21-30 tahun sebanyak 10 orang.

Variabel dalam penelitian ini yaitu transparansi dan pengawasan keuangan desa sebagai variabel bebas dan kinerja pemerintah desa sebagai variabel terikat. Data variabel-variabel tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Skor Kuesioner Regresi

Variabel	Item Pernyataan	Total SS	%	Total S	%	Total N	%	Total TS	%	Total STS	%
Transparansi (X1)	Pernyataan 1	9	12.0%	37	49.3%	19	25.3%	3	4.0%	7	9.3%
	Pernyataan 2	12	16.0%	41	54.6%	11	14.6%	5	6.6%	6	8.0%
	Pernyataan 3	19	25.3%	39	52.0%	11	14.6%	0	0	6	8.0%
	Pernyataan 4	12	16.0%	40	53.3%	11	14.6%	8	10.6%	4	5.3%
	Pernyataan 5	18	24.0%	34	45.3%	13	17.3%	6	8.0%	2	2.6%
	Pernyataan 6	15	20.0%	38	50.6%	17	22.6%	5	6.6%	0	0
	Pernyataan 7	16	21.3%	43	57.3%	15	20.0%	1	1.3%	0	0
	Pernyataan 8	16	21.3%	44	58.6%	15	20.0%	0	0	0	0
Pengawasan Keuangan Desa (X2)	Pernyataan 1	12	16.0%	40	53.3%	15	20.0%	3	4.0%	0	0
	Pernyataan 2	20	26.6%	41	54.6%	14	18.6%	0	0	0	0
	Pernyataan 2	13	17.3%	53	70.6%	8	10.6%	1	1.3%	0	0
	Pernyataan 3	16	21.3%	43	57.3%	10	13.3%	6	8.0%	0	0
	Pernyataan 4	12	16.0%	53	70.6%	9	12.0%	0	0	0	0
	Pernyataan	19	25.3%	42	56.0%	13	17.3%	0	0	1	1.3%

	5										
	Pernyataan 7	13	17.3 %	37	49.3 %	21	28.0%	3	4.0%	1	1.3%
	Pernyataan 8	22	29.3 %	40	53.3 %	12	16.0%	0	0	1	1.3%
Kinerja Pemerintah Desa (Y)	Pernyataan 1	24	32.0 %	43	57.3 %	6	8.0%	2	2.6%	0	0
	Pernyataan 2	28	37.3 %	42	56.0 %	3	4.0%	2	2.6%	0	0
	Pernyataan 3	29	38.6 %	46	61.3 %	5	6.6%	0	0	0	0
	Pernyataan 4	34	45.3 %	34	45.3 %	7	9.3%	0	0	0	0
	Pernyataan 5	23	30.6 %	42	56.0 %	8	10.6%	0	0	2	2.6%
	Pernyataan 6	18	24.0 %	47	62.6 %	9	12.0%	1	1.3%	0	0
	Pernyataan 7	34	45.3 %	34	45.3 %	7	9.3%	0	0	0	0
	Pernyataan 8	23	30.6 %	45	60.0 %	7	9.3%	0	0	0	0

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Peneliti menggunakan analisis dengan SPSS 22 untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Berikut hasil pengujian validitas:

a) Uji Validitas

Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Untuk *degree of freedom* (df) = $n-k$ dalam penelitian ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruk. Pada kasus ini besarnya df dapat dihitung $75-2$ atau $df=73$ dengan α 0,05 didapat 0,277, jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} dan nilai r positif, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid.

Adapun hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Corrected item pernyataan total correlation (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Transparansi	Pernyataan 1	0,822	0,227	Valid
	Pernyataan 2	0,812	0,227	Valid
	Pernyataan 3	0,823	0,227	Valid
	Pernyataan 4	0,765	0,227	Valid
	Pernyataan 5	0,732	0,227	Valid
	Pernyataan 6	0,703	0,227	Valid
	Pernyataan 7	0,473	0,227	Valid
	Pernyataan 8	0,579	0,227	Valid
Pengawasan Keuangan Desa	Pernyataan 1	0,472	0,227	Valid
	Pernyataan 2	0,429	0,227	Valid
	Pernyataan 3	0,429	0,227	Valid
	Pernyataan 4	0,550	0,227	Valid
	Pernyataan 5	0,532	0,227	Valid
	Pernyataan 6	0,515	0,227	Valid
	Pernyataan 7	0,525	0,227	Valid
	Pernyataan 8	0,345	0,227	Valid
Kinerja Pemerintah Desa	Pernyataan 1	0,422	0,227	Valid
	Pernyataan 2	0,381	0,227	Valid
	Pernyataan 3	0,453	0,227	Valid
	Pernyataan 4	0,527	0,227	Valid
	Pernyataan 5	0,607	0,227	Valid
	Pernyataan 6	0,424	0,227	Valid
	Pernyataan 7	0,503	0,227	Valid
	Pernyataan 8	0,412	0,227	Valid

Sumber: Output SPSS diolah, 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat pada kolom r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0.227, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid.

b) Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas instrumen maka menggunakan SPSS 22.

Adapun hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
uji reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.936	24

Sumber data : Output SPSS diolah, 2020

Dari keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60. Dengan demikian variabel (transparansi, pengawasan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa) dengan 24 bulir pernyataan sebesar 0,936 dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.9

Ringkasan Hasil Uji Regresi Linier Berganda

KPD = a + TR + PKD			
Model	Coefficient	T-Statistic	Sig
Konstanta	7.197	2.380	.020
Transparansi	.202	2.537	0.13
Pengawasan Keuangan Desa	.641	5.316	.000
N = 75 R ² = .545 Adj.R ² = .532 F-Statistic = 43.074 Sig = .000 ^b			
Variabel dependen adalah KPD dan Variabel indeviden adalah TR dan PKD *Signifikan pada alpha = 0.05 TR adalah Transparansi, PKD adalah Pengawasan Keuangan Desa			

Sumber : data primer diolah, 2020

4.3.2 Analisis regresi linier berganda

Dari tabel 4.9 dapat dirumuskan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara transparansi, pengawasan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa, sebagai berikut:

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 7.197 + 0,202X_1 + 0,642X_2$$

Diketahui :

Y = Kinerja Pemerintah Desa

X₁ = Transparansi

X₂ = Pengawasan Keuangan Desa

a = 7.197 apabila transparansi dan pengawasan keuangan desa dalam keadaan konstan atau 0 maka kinerja pemerintah desa nilainya sebesar 7.197

$b_1 = 0,202$ adalah besarnya koefisien regresi X_1 (transparansi) yang berarti setiap peningkatan X_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,202 atau 20,2%. Jika variabel transparansi meningkat maka kinerja pemerintah desa akan meningkat dan memiliki arah hubungan positif.

$b_2 = 0,642$ adalah besarnya koefisien regresi X_2 (pengawasan keuangan desa) yang berarti setiap peningkatan X_1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,642 atau 64,2%. Jika variabel pengawasan keuangan desa meningkat maka kinerja pemerintah desa akan meningkat dan memiliki arah hubungan positif.

4.3.3 Uji Hipotesis

a) Uji F (Uji Simultan)

Uji simultan ini, bertujuan untuk menguji atau mengkonfirmasi hipotesis yang menjelaskan “Ada pengaruh yang signifikan transparansi dan pengawasan kinerja pemerintah desa terhadap kinerja pemerintah desa”.

Dari tabel 4.9 tersebut diketahui nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 43,074 > F_{tabel} 3,97$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa.

b) Uji t (Uji Partial)

Uji partial ini bertujuan untuk menguji atau mengkonfirmasi hipotesis secara individual. Uji partial ini dalam hasil perhitungan statistik

Ordinary Least Square (OLS) ditunjukkan dengan t_{hitung} . Secara terperinci hasil t_{hitung} dijelaskan dalam tabel berikut:

Dari tabel 4.9 menunjukkan bahwa:

1. Hipotesis pertama diketahui untuk variabel transparansi (X_1) $t_{hitung} = 2.537 > t_{tabel} = 2.064$ dengan signifikan $0,013 > 0,05$ artinya transparansi tidak terdapat pengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.
2. Hipotesis kedua diketahui untuk variabel pengawasan keuangan pemerintah desa (X_2) $t_{hitung} = 5.316 > t_{tabel} = 2.064$ dan signifikan $0,00 < 0,05$, artinya pengawasan keuangan pemerintah desa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.

c) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen (Transparansi dan Pengawasan Keuangan Desa) terhadap variabel dependent (Kinerja Pemerintah Desa). Hasil olahan statistik yang dibantu program SPSS 22 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 54.5%, sedang yang 53.75% sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini (tidak diteliti).

4.4 Pembahasan

Penelitian ini melibatkan 75 responden, untuk memberikan informasi mengenai Pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. Dimulai dari hasil uji validitas yang menunjukkan bahwa hasil pernyataan angket yang disebar untuk 75 responden dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Kemudian hasil uji reliabilitas pada penelitian inipun reliable karena semua koefisien $> 0,60$.

Hasil analisis uji F (uji signifikan simultan) diketahui bahwa nilai signifikan $0,00 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 43,074 > F_{tabel} 3,97$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil analisis uji t berdasarkan Hipotesis pertama diketahui untuk variabel transparansi (X_1) $t_{hitung} = 2,537 > t_{tabel} = 2,064$ dengan signifikan $0,013 > 0,05$ artinya transparansi tidak terdapat pengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. sedang hipotesis kedua diketahui untuk variabel pengawasan keuangan desa (X_2) $t_{hitung} = 5,316 > t_{tabel} = 2,064$ dan signifikan $0,00 < 0,05$, artinya pengawasan keuangan desa berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Uji R (koefisien determinasi) sebesar 0,545 menunjukkan bahwa variabel transparansi dan pengawasan keuangan desa secara simultan terhadap kinerja pemerintah desa sebesar 54.5%, sedang yang 53.75% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.4.1 Pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa

Hasil uji empiris pengaruh antara transparansi terhadap kinerja pemerintah desa menunjukkan nilai t_{hitung} 2.537 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2.064 dan value (*sig*) sebesar 0.013 lebih besar alpha 5% hal ini menandakan bahwa ada pengaruh antara transparansi terhadap kinerja pemerintah desa yang tidak signifikan. penyebab variabel transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dikarenakan transparansi melalui pemerintah desa mengungkapkan tentang informasi keuangan dan non-keuangan kepada masyarakat melalui media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan haknya. ketika transparansi meningkat maka kinerja pemerintah desa juga meningkat. Jadi jika pemerintah desa ingin meningkatkan kinerja pemerintah desa maka harus meningkatkan transparansinya. Dari tabel 4.7 dapat dilihat pada kolom $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0.227, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Selanjutnya pada tabel 4.8 yaitu hasil uji reliabilitas dimana masing-masing variabel memiliki alpha $> 0,60$ pada variabel transparansi, pengawasan keuanagan desa dan kinerja pemerintah desa dapat dikatakan reliabel.

Hasil penelitian menerima hipotesis 1 yang menyatakan “transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa”. Nilai beta dalam *Unstandardized Coefficients* variabel transparansi menunjukkan angka sebesar 0,202. Yang artinya adalah besaran koefisien transparansi terhadap kinerja pemerintah desa adalah sebesar 20,2%.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa didukung oleh Putri, M. Suharno, Widarno, B (2015), Gobel (2017) dan Nurahmi (2019) menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nicolla (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi secara parsial tidak mempengaruhi kinerja pemerintah desa namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan

4.4.2 Pengaruh pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa

Hasil uji parsial pengaruh antara pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa menunjukkan nilai $t_{hitung} 5.316 >$ nilai $t_{tabel} 2.064$ dan P value (*sig*) sebesar 0.000 yang dibawah alpha 5% itu menandakan bahwa terdapat pengaruh signifikan pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. itu artinya bahwa pengawasan keuangan desa dapat mendorong pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi, serta pembangunan nasional berjalan sebagaimana mestinya, termasuk pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam mengembangkan kreativitas daerah, dan sumber dayanya demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian penyebab dari pengawasan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa adalah pengawasan desa telah menjelaskan tentang hasil yang dicapai dalam setiap kegiatan. pemerintah mempunyai pedoman dan prosedur kerja menyeluruh jenjang organisasi yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Dari tabel 4.6, dapat dilihat pada kolom r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0.227, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Selanjutnya pada tabel 4.7

yaitu hasil uji reliabilitas dimana masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha* > 0,60 pada variabel (transparansi, pengawasan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa) dapat dikatakan reliabel.

Hasil penelitian menerima hipotesis 2 yang menyatakan “pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa”. Dapat dilihat dari nilai beta dalam *Unstandardized Coeffisients* variabel pengawasan keuangan desa menunjukkan angka sebesar 0,641. Yang artinya adalah besaran koefisien pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa adalah sebesar 64,1%.

Hasil penelitian ini adalah pengawasan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dan didukung oleh Penelitian yang dilakukan Oleh Putri,M. Suharno, Widarno, B (2015), Adha dan Ernawati (2016) yang meneliti tentang pengaruh pengawasan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa dengan hasil penelitian bahwa secara parsial pengawasan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Namun sebaliknya Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dan data yang diperoleh dari penelitian sebagaimana telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa hal ini menandakan bahwa hipotesis 1 diterima. Ini merupakan wujud nyata pemerintah desa terutama pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bebas korupsi. Disamping itu, transparansi yang dilakukan pemerintah desa kepada publik merupakan bentuk keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan kepentingan masyarakat dalam hal ini bukti bahwa kinerja pemerintah desa semakin membaik jika transparansi di tingkatkan.
- 2) Pengawasan keuangan desa berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. hal ini menandakan bahwa hiopotesis 2 diterima. Dengan demikian kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik, pemimpin harus mempunyai sistem pengawasan yang diperlukan untuk mengarahkan para bawahannya dengan baik agar terhindar dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN).

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas, untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa, pemerintah desa juga harus meningkatkan kemampuan atau keahlian aparat pengelola dana desa dengan mengadakan pelatihan atau sosialisasi kebijakan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa juga memberikan kepercayaan terhadap masyarakat agar program-program desa bisa terealisasikan dengan bantuan masyarakat. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kinerja pemerintah desa meningkat karena transparansi dan pengawasan keuangan desa juga meningkat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya, di harapkan dapat menambah variabel penelitian seperti pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat yang akan mempengaruhi kinerja pemerintah desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmadja, Anantawikraman Tungga. 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Agus Dharma.2003. *Manajemen Supervisi: Petunjuk praktis bagi para supervisor*. Edisi Revisi. Cetakan Kelima.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Adha, A.H., & Ernawati, E(2016). Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Arifianti, H. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia) (Doctoral Dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Arief Rahman, S. E., & Com, M.(2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).
- Aziz, A. (2016) ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)’, *Eksis*, 11(1), pp. 86–101. Available at: <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>.
- Bayu Surianingrat1980. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*, Jakarta.
- Dadang, Kurnia. 2015. Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Disampaikan Pada Sosialisasi Pelaksanaan Uun No.6 TentangDesa”Kemenko Bid. Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
- Dessler, Gary, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kesembilan, Jilid 1, PT.Indeks Kelompok Gramedia.
- E.Mulyasa 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Erni, Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*. Prenada Media. Jakarta.
- Gobel.S.V.2017.Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa.

- Hasan, Iqbal, 2001. *Pokok-Pokok Materi Statistic 1 (Statistic Deskriptif)*. Pt Bumi Aksara. Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011, “*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*”, Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro.Semarang.
- Jufrizen.2016. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja Pada PT.Socfin Indonesia Medan.Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis UMSU, 17(02)
- Kristianton 2006. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta
- King, Patricia. (1993). *Performance Planning Appraizal: A How-To Book For Manager*. McGraw-Hill Book Company. New York, St. Louis San Francisco Hlm 19.
- Kresnamurti, R. P, & Putri, A. (2012). Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Produk Oli Federal Di Wilayah Jakarta Timur (Studi Kasus Pada Bengkel Resmin Ahadd 2657 Dewi Sartika).
- Miftahuddin.2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Moehariono.2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Rajawali Pers. Jakarta
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Malhotra, N.K. 2004. *Marketing Research: An Applied Orientation.4th Edition* New Jersey: Person Education Inc.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta
- Mangkunegara. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nawawi, H. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Nurahmi.2019.Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes Terhadap Kinerja Pemerintah Desa.
- Nurkhasannah.2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- Nicolla.2019. Pngaeruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Putra, N. (2016). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daearh, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara.
- Primadona, Alamanda. 2013. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kota Bandung). Skripsi, Universitas Komputer, Indonesia.
- Priyatun, I. (2016). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Universitas Negeri Lampung. Lampung.
- Pontas R. Siahn. 2004. Pengelolaan SDM dalam Rangka Penerapan Good Corporate Governance, Makalah dalam workshop GCG bagi Pegawai Duputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian di Pusdiklat Pengawasan Bpkp Gadog, Bogor.
- Pasolong, Harbani.2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Putri, M. Suharno, Widarno, B (2015). Pengaruh Transparansi, Akuntablitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Majenang Sukandono Sragen). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1).
- Rulyanti, D. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *BISMA*, 11(3), 323-335
- Ramanadei, P. (2009). Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan System Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Apparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura) (Doctoral Dissertation, Diponegoro University).

- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, y. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *BISMA*, 11(3), 323-335
- Suharyadi dan purwanto.2011. *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*.Edisi 2.Salemba Empat : Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Suryoatmono, Bambang. 2004. *Statistika Non Parametrik Dan Penerapannya Dalam Penelitian Manajemen*. Bandung.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Sugeng. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah dan implikasinya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* Juli. 1 (2): 16-26.
- Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Kandung, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Dipublikasikan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wiguna, M. B. S., Yuniarta, G. A., AK S., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *JIMAT(Jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi) undiksha*, 3(1).
- Wida, S.A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 14-152.

